

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Adanya otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah daerah untuk menyajikan Laporan Keuangan secara transparan dan tepat.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan entitas yang lain (Nordiawan, 2012:20)

Pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan

yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen asset yang tercermin dalam neraca daerah yang setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran (Yusuf, 2010). Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan aparat pemerintah yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Ketidakhahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Keuangan Negara wajib dikelola oleh aparatur negara yang kompeten secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai

satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat serta peran dari audit intern untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru di lingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan aparatur sipil yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Berdasarkan teori dari beberapa ahli dan peneliti, kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kompetensi Aparatur Sipil Negara serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Fenomena yang juga mendukung penelitian ini, yaitu adanya pengaduan dari DPRD atas keterlambatan SKPD yang belum mengumpulkan laporan semester. Berdasarkan permendagri nomor 31 tahun 2015 tentang penyusunan APBD Tahun 2016 memerintahkan serta mengamanatkan bahwa seluruh SKPD wajib melaporkan laporan persatu semester ke DPRD, seluruh SKPD harus menyampaikan laporan semesternya tentang berapa persen resapan anggaran, laporan semester dari SKPD tersebut seharusnya sudah masuk sejak akhir Juni 2016, namun DPRD belum menerima laporan tersebut (antarababel.com 2016).

Adanya keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban dikarenakan belum semua pengelola keuangan SKPD memahami dengan baik tentang ketentuan peraturan di bidang keuangan termasuk standar akuntansi pemerintah dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan penempatan posisi kerja. Pengelolaan keuangan pemerintah harus dikelola oleh SDM yang paham dan mampu menerapkan peraturan keuangan dan menjalankan fungsi akuntansi dengan baik.

Selain itu efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) pemerintah daerah belum optimal. Belum optimalnya efektivitas sistem pengendalian internal

pemerintah daerah meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan dan kurangnya komitmen terhadap kompetensi, lemahnya pengendalian fisik atas asset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat dan tepat waktu.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan masih banyak data-data yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang tidak sesuai dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh audit laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Berdasarkan uraian diatas hal yang menjadi pertimbangan masalah secara khusus sehingga memilih judul : **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya permasalahan dan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur Sipil Negara Bidang Akuntansi berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang?

2. Apakah Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang?
3. Apakah Kepatuhan pada Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pegawai SKPD bidang akuntansi dan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia bidang Akuntansi, efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan pada standar akuntansi pemerintah (SAP), sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
2. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

3. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh Kepatuhan pada Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Untuk bidang Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi, akuntansi pemerintahan di Indonesia, dan sebagai referensi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat digunakan Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dan rerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian, objek penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang pembahasan serta analisis yang digunakan dengan menggunakan teknis analisis pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan mengusulkan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan maupun penelitian selanjutnya.